



Proyek PSEL DIY Ditunda

Pemkot Genjot Pengolahan Sampah Mandiri

YOGYAKARTA, Joglo
Jogja – Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta bergerak cepat mengantisipasi potensi kembalinya darurat sampah di wilayahnya. Langkah taktis ini diambil menyusul penundaan proyek strategis pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Proyek yang semula ditargetkan beroperasi pada 2027 tersebut dipastikan mundur hingga pertengahan 2028.

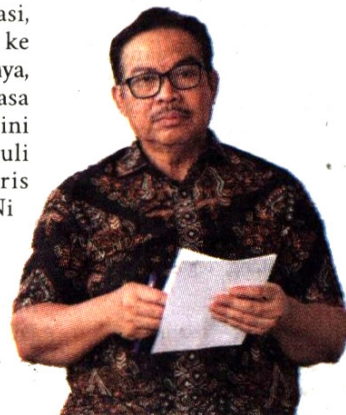
Mundurinya jadwal ini dipicu belum tercapainya

kesepakatan negosiasi hingga tenggat waktu akhir April 2026 lalu. Akibatnya, posisi DIY melorot dari prioritas utama (batch pertama) ke gelombang kedua (batch dua).

“Awalnya PSEL kita masuk batch pertama. Namun, karena sampai batas waktu akhir April belum ada kesepakatan negosiasi, akhirnya dimasukkan ke batch kedua. Konsekuensinya, jika dihitung dengan masa pembangunan, fasilitas ini baru bisa beroperasi Juli 2028,” beber Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti di Kompleks Kepatihan Yogyakarta.

Rencananya, teknologi insinerator bersuhu tinggi itu akan didirikan di atas lahan eks Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan seluas 5,7 hektare. Fasilitas tersebut diproyeksikan mampu memusnahkan sekitar 1.000 ton sampah per hari.

■ Baca **PROYEK...** Hal II



DOK PRIBADI/JOGLO JOGJA

Hasto Wardoyo
Wali Kota Yogyakarta

Proyek PSEL DIY Ditunda

sambungan dari hal Jogja Jogja

Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo menegaskan bahwa Pemkot Jogja saat ini memilih fokus memaksimalkan pengelolaan sampah domestik di tingkat hulu. Hal itu krusial mengingat Kota Gudeg merupakan produsen sampah terbesar di DIY, namun sangat minim ketersediaan lahan. "Di kota ini volume sampahnya paling besar,

sementara kita tidak punya lahan. Tapi alhamdulillah, lewat gerakan pengolahan sampah yang masif, setiap hari kita bisa menyelesaikan sekitar 300 ton sampah," kata Hasto Wardoyo. Hasto memaparkan, produksi sampah di Kota Yogyakarta rata-rata mencapai 300 hingga 400 ton per hari. Angka tersebut

sebenarnya belum mampu memenuhi kuota minimal operasional PSEL yang mensyaratkan pasokan hingga 1.000 ton per hari. Persoalan pasokan ini pula yang menjadi salah satu ganjalan dalam draf nota kesepahaman (MoU) antarwilayah. "Volume 1.000 ton per hari itu masih menjadi bahan pertimbangan mendalam.

Sebab, dalam draf MoU yang baru, ada klausul sanksi atau punishment berupa denda finansial bagi pemerintah daerah jika gagal memenuhi kuota pasokan tersebut," urai Hasto. Selain urusan pasokan, kendala teknis penyiapan lahan juga mencuat. Berdasarkan kajian terbaru, kompleksitas proyek PSEL memerlukan

tambahan lahan sekurangnya satu hektare di luar area 5,7 hektare yang sudah siap. Lahan tambahan itu khusus dialokasikan untuk menampung residu atau abu sisa proses pembakaran baku. "Tambahan lahan satu hektare untuk residu abu seperti ini tentu memerlukan perencanaan dan persiapan baru lagi dari pemda maupun

pemkab/pemkot," imbuhnya. Di tengah masa transisi dan evaluasi PSEL DIY, Pemkot Yogyakarta memilih mengoptimalkan skema pemilahan serta pengurangan sampah langsung dari sumbernya. Sistem penyaringan diperketat, mulai dari pemilahan skala rumah tangga, tata kelola di depo-depo keberangkatan, hingga gerakan

pembatasan plastik. "Setiap hari sekitar 300 ton sampah bisa diredam dan diselesaikan di tingkat lokal. Hasilnya, saat ini tidak ada lagi penumpukan di depo-depo kota. Langkah ini diharapkan menjaga stabilitas lingkungan sembari menunggu kesiapan solusi jangka panjang (PSEL) terealisasi," tandas Hasto. (eri/bid/wa)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Walikota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005